# BAB III

# PROFIL PERUSAHAAN

## 3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

Tinjauan umum perusahaan meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi, maksud dan tujuan pendirian serta deskripsi kerja yang ada di lingkungan BKKBN Provinsi Jawa Barat dijelaskan di bawah ini.

### 3.1.1 Sejarah dan Perkembangan BKKBN Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 1957 dibentuk Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia. PKBI merupakan pelopor usaha kegiatan Keluarga Berencana Indonesia. Perkumpulan tersebut telah membantu meletakkan landasan perubahan pandangan masyarakat maupun pemerintah, sehingga usaha kegiatan Keluarga Berencana menjadi Program Nasional. Perhatian pemerintah tersebut diwujudkan dalam bentuk Lembaga Keluarga Berencna Nasional (LKBN) yang berstatus semi pemerintah, dimana pemerintah belum mengambil tanggung jawab sepenuhnya.

Lembaga Keluarga Berencana tersebut terbentuk pada tahun 1968 setelah lebih dari setahun melaksanakan kegiatan tersebut. Pemerintah menyadari bahwa usaha Keluarga Berencana merupakan bagian yang penting dalam Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional ini akan

baik apabila tanggung jawab dan pembiayaan secara penuh ditangani pemerintah.

Dengan SK. Presiden No. 8 Tahun 1970, pada tanggal 29 Juni 1970 LKBN dirubah menjadi BKKBN dengan dasar pemikiran yaitu :

1. Program KB Nasional perlu ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia.
2. Program KB Nasional lebih digiatkan pula dengan mengikutsertakan masyarakat dan Pemerintah Nasional.
3. Program KB Nasional perlu diselenggarakan secara teratur dan terencana kearah terwujudnya tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BKKBN bertugas untuk mengkoordinir semua kegiatan yang ada kaitannya dengan kegiatan perencanaan keluarga. Dengan dibentuknya BKKBN maka peran daripada PKBI dialihkan dalam bidang pendidikan masyarakat dan bidang latihan kerja kegiatan KB.

Dengan dibentuknya BKKBN diharapkan akan berhasil mengendalikan serta menurunkan tingkat kelahiran. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya dibidang kesejahteraan ekonomi, tidak akan tercapai hasil yang memuaskan apabila tidak diikuti dan disertai pelaksanaan dan pengendalian kelahiran. Sehingga program KB berhasil baik maka pada tahun 1981 terlihat mulai menurun tingkat kelahirannya, dengan asumsi bahwa tingkat kesuburan/pertilisasi secara berangsur-angsur dan secara garis lurus, maka pada akhir abad ke 20 ini jumlah di Indonesia berkisar 210 juta.

### 3.1.2 Maksud dan Tujuan Pendirian

Tujuan yang hendak dicapai dengan didirikannya BKKBN secara garis besar adalah kesinambungan antara jumlah penduduk yang ada dengan faktor-faktor kebutuhan hidup penduduk, sehingga diharapkan pertambahan penduduk tidak akan melebihi pertambahan (kenaikan) produksi pangan.

Maksud dari didirkannya BKKBN provinsi Jawa Barat Bandung adalah perwakilan di provinsi. Dengan adanya BKKBN Provinsi Jawa Barat, diharapkan lebih tujuan utama BKKBN.

Adapun tujuan utamanya adalah antara lain :

1. Menurunkan angka kelahiran dengan jalan meningkatkan akseptor KB Nasional.
2. Meletakkan bagi pengendalian fertilitas, karena tingkat fertilitas diperkirakan berlipat ganda, dua kali lipat setiap 25 tahun dan perkembangan demikian tidak seimbang dengan kemampuan kita untuk menggerakkan pembangunan ekonomi.
3. Mewujudkan generasi yang akan datang yang dapat menikmati kehidupan yang selaras antara junlah penduduk dengan berbagai fasilitas kehidupan.
4. Mewujudakan generasi penerus yang berkualitas untuk melaksanakan program akselerasi dan modernisasi pembangunan nasional.

## 3.2 Struktur Organisani BKKBN Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi merupakan hubungan antara karyawan dan menggambarkan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab suatu kelompok kerja. Struktur organisasi selalu tergantung pada luasnya bidang pekerjaan, dalam struktur organisasi akan terlihat jelas karena digambarkan dalam badan organisasi yang membuat kedudukan dan status fungsional.

Struktur organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat tergambar jelas pada bagian lampiran, namun sebelumnya akan diungkapkan terlebih dahulu tentang pengertian organisasi. Menurut Boone Kurtz, organisasi didefinisikan sebagai suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi BKKBN provinsi Jawa Barat dapat dilihat di lembar lempiran A.

## 3.3 Deskripsi Kerja

Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi adalah instansi yang vertikal dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Daerah Tingkat I, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Nasional. Perwakilan BKKBN provinsi dipmpin oleh seorang kepala yang disebut kepala BKKBN provinsi.

BKKBN selain melaksanakan tugasnya, juga memberikan penerangan langsung kepada masyarakat, yaitu memberikan pengarahan-pengarahan dan himbauan kepada masyarakat agar ikut serta dalam melaksanakan atau mensukseskan program KB Nasional. Program BKKBN yang dilakukan dilapangan biasanya berlangsung pada tempat-tempat tertentu misalnya :

1. Posyandu
2. Tempat-tempat pengobatan/kesehatan
3. Pada sarana dan kegiatan lainnya.

Karena itu, usaha di instansi BKKBN tidak terbatas hanya dikantor-kantor BKKBN tetapi juga langsung berhadapan dilingkungan masyarakat, agar mereka mengenal dan tahu bagaimana melaksanakan program yang telah direncanakan. Dengan demikian masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan lingkungan keluarganya masing-masing, sehingga program pemerintah dengan mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) dapat tercapai dan masyarakat dapat merasakan manfaat dalam kehidupan mereka.

## 3.4 Analisis sistem yang berjalan

Analisis sistem didefinisikan sebagimana memahami dan menspesifikasi dengan detil apa yang harus di lakukan oleh sistem.

Sementara sistem desain diartikan sebagi menjelaskan dengan detil bagaimana bagian-bagian sistem informasi diimplementasikan. [FAT04]

Sistem yang berjalan di bidang IKAP meliputi penerimaan dokumen data keluarga, pengentryan data keluarga dan individu, serta membuat laporan yang akan diserahkan kembali ke Kabupaten Kota. Sistem tersebut pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan dimengerti oleh para petugas bagian entry data. Namun ada sedikit kendala dan hambatan pada saat mengentry dan harus mengkonversi tipe database, yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu penulis mencoba membuat aplikasi yang baru tanpa merubah prosedur kerja pengentryan data.